



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 329/PR.07-SD/01/KPU/IV/2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Daftar Nota Kesepahaman
KPU dan Permohonan Daftar
Inventarisasi Nota Kesepahaman

Jakarta, 12 April 2021

Yth. **Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
Seluruh Indonesia
(daftar terlampir)**
Di
Tempat

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kerja Sama antara KPU dan K/L/I serta Pemangku Kepentingan Pemilu, disampaikan bahwa KPU RI hingga saat ini telah melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman sebagaimana terlampir.

Berkaitan dengan hal tersebut, dimohon kepada KPU Provinsi agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pencermatan atas Nota Kesepahaman sebagaimana terlampir;
2. Melakukan identifikasi mengenai Nota Kesepahaman yang membutuhkan tindak lanjut dengan Pemerintah Provinsi, SKPD, atau Perwakilan K/L di tingkat Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi agar :
 - a. Menyampaikan informasi dan mengkoordinasikan inventarisasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya;
 - b. Melakukan monitoring dan supervisi;
 - c. Menyampaikan kepada KPU RI hal-hal sebagai berikut (format tabel terlampir):
 - 1) Daftar Inventarisasi Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang masih berlaku;
 - 2) Daftar Nota Kesepahaman yang dibutuhkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, terutama dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - 3) Daftar Inventarisasi Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama dengan Para Pemangku Kepentingan terkait;

- d. Penyampaian daftar inventarisasi dimohon untuk dapat disampaikan melalui email ke inter-org.division@kpu.go.id dan kalkpu@yahoo.com dalam format pdf dan *word*, paling lambat pada 15 April 2021.
4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Fasilitasi Administrasi Kerja Sama Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen KPU, Rizkyasri Putri (Hp: 081259592992) atau Ikhsan Fadlilah (Hp: 085155368223).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

**Plt. Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,**



Ilham Saputra

Lampiran Surat

Nomor : 329/PR.07-SD/01/KPU/IV/2021

Tanggal : 12 April 2021

Kepada Yth. Ketua:

1. KIP Provinsi Aceh
2. KPU Provinsi Sumatera Utara
3. KPU Provinsi Sumatra Barat
4. KPU Provinsi Riau
5. KPU Provinsi Kepulauan Riau
6. KPU Provinsi Jambi
7. KPU Provinsi Sumatera Selatan
8. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. KPU Provinsi Bengkulu
10. KPU Provinsi Lampung
11. KPU Provinsi Banten
12. KPU Provinsi DKI Jakarta
13. KPU Provinsi Jawa Barat
14. KPU Provinsi Jawa Tengah
15. KPU D.I Yogyakarta
16. KPU Provinsi Jawa Timur
17. KPU Provinsi Bali
18. KPU Provinsi NTB
19. KPU Provinsi NTT
20. KPU Provinsi Kalimantan Barat
21. KPU Provinsi Kalimantan Tengah
22. KPU Provinsi Kalimantan Selatan
23. KPU Provinsi Kalimantan Timur
24. KPU Provinsi Kalimantan Utara
25. KPU Provinsi Sulawesi Utara
26. KPU Provinsi Gorontalo
27. KPU Provinsi Sulawesi Tengah
28. KPU Provinsi Sulawesi Barat
29. KPU Provinsi Sulawesi Selatan
30. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
31. KPU Provinsi Maluku
32. KPU Provinsi Maluku Utara
33. KPU Provinsi Papua Barat
34. KPU Provinsi Papua

**DAFTAR INVENTARISASI NOTA KESEPAHAMAN DAN/ATAU PERJANJIAN KERJA SAMA YANG TELAH DILAKUKAN
OLEH KPU PROVINSI DAN/ATAU KPU KABUPATEN/KOTA YANG MASIH BERLAKU**

KPU PROVINSI					
NO	K/L//SKPD/ PEMERINTAH DAERAH	NOMOR DAN TANGGAL PENANDATANGANAN	NOTA KESEPAHAMAN/ PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG	RUANG LINGKUP	MASA BERLAKU
1. KPU KABUPATEN/KOTA					
NO	K/L/SKPD/ PEMERINTAH DAERAH	NOMOR DAN TANGGAL PENANDATANGANAN	NOTA KESEPAHAMAN/ PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG	RUANG LINGKUP	MASA BERLAKU
2. KPU KABUPATEN/KOTA					
NO	K/L/SKPD/ PEMERINTAH DAERAH	NOMOR DAN TANGGAL PENANDATANGANAN	NOTA KESEPAHAMAN/ PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG	RUANG LINGKUP	MASA BERLAKU
Dst					

**DAFTAR NOTA KESEPAHAMAN YANG DIBUTUHKAN OLEH
KPU PROVINSI**

NO	K/L//LAINNYA	TENTANG	KETERANGAN

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA DENGAN PARA
PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
KPU PROVINSI**

NO	PERMASALAHAN	USULAN REKOMENDASI (JIKA ADA)

**DAFTAR INVENTARISASI
NOTA KESEPAHAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN INSTANSI/LEMBAGA DALAM NEGERI
TAHUN 2016 s.d. 2020
YANG MASIH BERLAKU**

NO	K/L/I	TENTANG	RUANG LINGKUP	TGL/ TEMPAT	JANGKA WAKTU			KET
					MULAI	BERAKHIR	MASA BERLAKU	
I. MASIH BERLAKU								
1.	BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) 01/KB/KPU/TAHUN 2017	PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENUNJANG PENYELENGGAR AAN PEMILIHAN UMUM	<p>a. Pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi strategis untuk meningkatkan kinerja PARA PIHAK;</p> <p>b. Peningkatan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang penyelenggaraan pemilihan umum, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 2. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. <p>c. Sosialisasi kegiatan melalui media publikasi serta seminar, konferensi, simposium, atau lokakarya;</p>	Selasa, 02 Mei 2017, Kantor BPPT Jakarta	02/05/2 017	02/05/2022	5 Tahun	Masih berlaku

**DAFTAR INVENTARISASI
NOTA KESEPAHAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN INSTANSI/LEMBAGA DALAM NEGERI
TAHUN 2016 s.d. 2020
YANG MASIH BERLAKU**

NO	K/L/I	TENTANG	RUANG LINGKUP	TGL/ TEMPAT	JANGKA WAKTU			KET
					MULAI	BERAKHIR	MASA BERLAKU	
			a. Ruang lingkup lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi asing-masing PIHAK.					
II. MASIH BERLAKU NAMUN SEGERA BERAKHIR DI TAHUN 2021								
TAHUN 2016								
1.	INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (IAPI) 11/KB/KPU/TAHUN 2016	PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE	a. Penyusunan regulasi atau kebijakan terkait dengan pelaporan dan Audit Dana Kampanye; b. Penyediaan profil data Kantor Akuntan Publik yang memenuhi syarat ; c. Pendampingan dan pelaksanaan Peraturan yang terkait dengan Pelaporan dan Audit Dana Kampanye; dan d. Kegiatan lainnya yang disetujui kemudian oleh PARA PIHAK.	Senin, 14 November 2016, Kantor KPU	14/11/2 016	14/11/2021	5 Tahun	Segera Berakhir di 2021
2.	KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA (KIP) 14/KB/KPU/TAHUN 2016	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK PENYELENGGAR AAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR,	a. Peningkatan Kualitas Informasi dala Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota; dan b. Peningkatan Kapasitas Layanan Informasi dalam penyelenggaraan Peilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota.	Selasa, 29 November 2016, Jakarta	29/11/2 016	29/11/2021	5 Tahun	Segera Berakhir di 2021

**DAFTAR INVENTARISASI
NOTA KESEPAHAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN INSTANSI/LEMBAGA DALAM NEGERI
TAHUN 2016 s.d. 2020
YANG MASIH BERLAKU**

NO	K/L/I	TENTANG	RUANG LINGKUP	TGL/ TEMPAT	JANGKA WAKTU			KET
					MULAI	BERAKHIR	MASA BERLAKU	
		BUPATI, SERTA WALIKOTA YANG TRANSPARAN DAN BERINTEGRITAS						
3.	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 13/KB/KPU/2016	PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, SERTA WALIKOTA	a. Pola hubungan dalam penanganan pengaduan masyarakat; b. Mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat; c. Tukar menukar informasi terkait penanganan pengaduan masyarakat yang disepakati PARA PIHAK; dan d. Memfasilitasi komitmen bersama untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik oleh peserta pemilu.	Kamis, 24 November 2016, Medan, Sumatera Utara	24/11/2016	24/11/2021	5 Tahun	Segera Berakhir di 2021
TAHUN 2018								
4.	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) 03/PP.12.2-NK/07/KPU/III/2018	PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN	a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah; b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah; c. Sosialisasi dan penyebaran kegiatan melalui media publikasi serta seminar, konferensi, simposium, atau lokakarya;	Jakarta, 5 Maret 2018	05/03/2018	05/03/2021	3 Tahun	Segera Berakhir di 2021

**DAFTAR INVENTARISASI
NOTA KESEPAHAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN INSTANSI/LEMBAGA DALAM NEGERI
TAHUN 2016 s.d. 2020
YANG MASIH BERLAKU**

NO	K/L/I	TENTANG	RUANG LINGKUP	TGL/ TEMPAT	JANGKA WAKTU			KET
					MULAI	BERAKHIR	MASA BERLAKU	
		WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018 DAN TAHUN 2020, SERTA PENYELENGGAR AAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019	d. Konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah; e. Penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing; dan f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.					
5.	ASOSIASI MEDIA SIBER INDONESIA 30/PR.07- NK/01/KPU/XII/2020	Pelaksanaan Cek Fakta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	a. Penyediaan informasi mengenai tahapan, program, dan jadwal Pemilihan, dan/atau informasi yang berada dalam pengelolaan PIHAK KEDUA sebagai input substansi Cek Fakta; b. Penyebaran informasi Pemilihan melalui Cek Fakta; c. Dokumentasi, pendataan, dan penyusunan bahan rujukan Cek Fakta; d. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia PARA PIHAK;		02/12/2020	02/12/2021	1 Tahun	Masih Berlaku

**DAFTAR INVENTARISASI
NOTA KESEPAHAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN INSTANSI/LEMBAGA DALAM NEGERI
TAHUN 2016 s.d. 2020
YANG MASIH BERLAKU**

NO	K/L/I	TENTANG	RUANG LINGKUP	TGL/ TEMPAT	JANGKA WAKTU			KET
					MULAI	BERAKHIR	MASA BERLAKU	
			g. Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang disepakati oleh PARA PIHAK;					
III. MASIH BERLAKU ATAU SUDAH DIPERPANJANG DI TAHUN 2020								
TAHUN 2019								
1.	PUSAT PEMILIHAN UMUM AKSES PENYANDANG DISABILITAS (PPUA PENCA) 4/PR.07-NK/01/KPU/II/2019	PENINGKATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SEBAGAI PERWUJUDAN KESETARAAN HAK POLITIK SETIAP WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA	<p>a. Peningkatan kapasitas dan peran serta PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>b. Fasilitasi perumusan dan penerapan regulasi atau kebijakan Pemilu dan Pemilihan yang responsif akses penyandang Disabilitas;</p> <p>c. Fasilitasi rancangan alat bantu warga penyandang disabilitas, pemberian layanan, dan bantuan pendamping, sarana dan prasarana Pemilu yang aksesibel bagi pemilih disabilitas;</p> <p>d. Fasilitasi konsultasi, sosialisasi, dan publikasi pemilu akses, pendidikan penyelenggara Pemilu dan pendidikan pemilih disabilitas untuk</p>	Kamis, 7 Februari 2019, Jakarta	07/02/2019	07/02/2024	5 Tahun	Masih Berlaku

**DAFTAR INVENTARISASI
NOTA KESEPAHAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN INSTANSI/LEMBAGA DALAM NEGERI
TAHUN 2016 s.d. 2020
YANG MASIH BERLAKU**

NO	K/L/I	TENTANG	RUANG LINGKUP	TGL/ TEMPAT	JANGKA WAKTU			KET
					MULAI	BERAKHIR	MASA BERLAKU	
			<p>meningkatkan akses penyandang disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>e. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang aksesibel dan non diskriminasi bagi pemilih disabilitas; dan</p> <p>f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang dapat ditinjau dan dikembangkan serta tidak bertentangan dengan keputusan yang berlaku.</p>					
TAHUN 2020								
2.	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI) 6/TU.03.1-NK/01/KPU/III/2020	PENYELAMATAN, PELESTARIAN, DAN PEMANFAATAN ARSIP PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI	<p>a. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan PIHAK KESATU;</p> <p>b. Pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan PIHAK KESATU;</p> <p>c. Penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan</p>	Jakarta, 13 Maret 2020	13/03/2020	13/03/2025	5 Tahun	Masih Berlaku

**DAFTAR INVENTARISASI
NOTA KESEPAHAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN INSTANSI/LEMBAGA DALAM NEGERI
TAHUN 2016 s.d. 2020
YANG MASIH BERLAKU**

NO	K/L/I	TENTANG	RUANG LINGKUP	TGL/ TEMPAT	JANGKA WAKTU			KET
					MULAI	BERAKHIR	MASA BERLAKU	
		KOTA DAN WAKIL WALI KOTA	d. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.					
3.	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 24/PR.07- NK/01/KPU/IX/2020	PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM PENYELENGGAR AAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN	a. Pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan untuk peningkatan semangat berkeadilan dan kejujuran; b. Internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembuatan dan analisa peraturan/kebijakan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; c. Sosialisasi, seminar, lokakarya, diskusi grup terpumpun, workshop, pelatihan dan kegiatan ilmiah lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila; d. Penyusunan narasi ideologi Pancasila dalam berbagai bentuk pemberitaan di masyarakat khususnya terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan; e. Pelaksanaan advokasi yang meliputi pencegahan, pendampingan dan monitoring dalam rangka menjamin pelaksanaan Pemilihan Umum dan	Jakarta/ 11 September 2020	11 Septem ber 2020	11 September 2025	5 tahun	

**DAFTAR INVENTARISASI
 NOTA KESEPAHAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 DENGAN INSTANSI/LEMBAGA DALAM NEGERI
 TAHUN 2016 s.d. 2020
 YANG MASIH BERLAKU**

NO	K/L/I	TENTANG	RUANG LINGKUP	TGL/ TEMPAT	JANGKA WAKTU			KET
					MULAI	BERAKHIR	MASA BERLAKU	
			Pemilihan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; f. Pengkajian dan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila yang akan digunakan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; g. Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila kepada penyelenggara, pemilih dan peserta yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan; h. Pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang dilaksanakan PARA PIHAK; dan i. Tukar-menukar data dan informasi dan bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
4.	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	a. Penyebarluasan informasi dan edukasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan		02/12/2020	02/12/2025	5 Tahun	Masih Berlaku

**DAFTAR INVENTARISASI
NOTA KESEPAHAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN INSTANSI/LEMBAGA DALAM NEGERI
TAHUN 2016 s.d. 2020
YANG MASIH BERLAKU**

NO	K/L/I	TENTANG	RUANG LINGKUP	TGL/ TEMPAT	JANGKA WAKTU			KET
					MULAI	BERAKHIR	MASA BERLAKU	
	29/PR.07- NK/01/KPU/XII/2020	dan Prekursor Narkotika	<p>dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>b. Peningkatan peran serta PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan Anti Narkotika.</p> <p>c. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh PIHAK KESATU di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan PIHAK KEDUA.</p> <p>d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.</p> <p>e. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara.</p> <p>f. Pemberian akses kepada PIHAK KESATU untuk melakukan tindakan</p>					

**DAFTAR INVENTARISASI
NOTA KESEPAHAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN INSTANSI/LEMBAGA DALAM NEGERI
TAHUN 2016 s.d. 2020
YANG MASIH BERLAKU**

NO	K/L/I	TENTANG	RUANG LINGKUP	TGL/ TEMPAT	JANGKA WAKTU			KET
					MULAI	BERAKHIR	MASA BERLAKU	
			<p>yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>g. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>a. Bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.</p>					
5.	Tentara Nasional Indonesia (TNI) 1/PR.07- NK/01/KPU/II/2021	Bantuan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya serta Pertukaran Data dan Informasi dalam Pemilu dan Pemilihan	<p>a. Bantuan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>b. Pertukaran data dan informasi secara terbatas; dan</p> <p>c. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK</p>	Jakarta/ 25 Februari 2021	25 Februar i 2021	25 Februari 2026	5 tahun	
6.	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2/PR.07- NK/01/KPU/III/2021	Kerja Sama dalam Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	<p>a. Dukungan kebijakan terkait upaya penanggulangan pandemi COVID-19;</p> <p>b. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya penanggulangan pandemi COVID-19;</p>	Jakarta/ 2 Maret 2021	2 Maret 2021	2 Maret 2026	5 tahun	

**DAFTAR INVENTARISASI
 NOTA KESEPAHAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 DENGAN INSTANSI/LEMBAGA DALAM NEGERI
 TAHUN 2016 s.d. 2020
 YANG MASIH BERLAKU**

NO	K/L/I	TENTANG	RUANG LINGKUP	TGL/ TEMPAT	JANGKA WAKTU			KET
					MULAI	BERAKHIR	MASA BERLAKU	
			c. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Pemanfaatan Daftar Pemilih sebagai salah satu dasar pendataan sasaran Pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-10; dan d. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.					